

**Jurnal Sejarah.** Vol. 1(2), 2018: 65 – 83

© Pengurus Pusat Masyarakat Sejarawan Indonesia

NASUTION/10.26639/js.v1i2.83

# **Transformasi Modernitas di Kota Medan: Dari Kampung Medan Putri Hingga Gemeente Medan**

**Junaidi Nasution**

Mahasiswa Pascasarjana Universitas Gadjah Mada

Junaidi.nasution26@gmail.com

## **Abstract**

Every city in Indonesia has a unique character. Medan is a city with a population that is considered a mini Indonesia in the Dutch colonial era. It is in the city of Medan inhabited by various tribes that according to Hamka one of the most blooming nation of the nation of Indonesia development. But there is a unique in the development of Medan into a city. Basically, the process of developing the city of Medan, not the thing that has been designed by the Dutch colonial government, like other cities in Indonesia. The city of Medan is formed by the interests of the capitalist entrepreneurs for this region as the economic axis of the plantation on the east coast of Sumatra.

*Keywords:* Medan, transformation of modernity, capitalism, plantation, East Sumatra

## Pengantar

Keberadaan sebuah kota pada masa kolonial, tidak terlepas dari ekspansi yang dilakukan oleh kolonialis terhadap suatu wilayah kota. Ekspansi tersebut dapat berupa penguasaan dalam bidang pemerintahan, ekonomi dan sosial. Perkembangan kota antara lain didukung dengan adanya peningkatan jumlah demografi, adanya infrastruktur berupa fasilitas-fasilitas umum, dan juga adanya sarana transportasi.

Medan sebagai salah satu kota terbesar di Sumatera merupakan kota yang berkembang pesat karena ekonomi kapitalisme perkebunan. Wilayah yang sekarang disebut Medan pada awalnya adalah perkampungan yang sederhana, namun bertransformasi menjadi pusat pemerintahan dan ekonomi yang kompleks dimasa kolonialisme Belanda. Dengan masuknya kapitalisme perkebunan pada tahun 1865, terjadi gelombang migrasi ke wilayah ini, sehingga tingkat rasio penduduk meningkat yang terdiri dari berbagai ras dan suku bangsa.

Wilayah yang sekarang disebut sebagai Kota Medan, dahulunya terdiri dari beberapa kampung-kampung kecil, seperti kampung Medan Putri, kampung Pulo Brayan, dan kampung Kesawan. Kampung Medan Putri, sebagai pusat Kota Medan awal, merupakan kampung orang Melayu. Kampung Medan Putri ini terletak di antara Sungai Babura dan Sungai Deli yang mana wilayah ini bagian dari wilayah XII Kuta Hambaran Perak. Dari beberapa kampung-kampung kecil itulah Kota Medan mulai berkembang. Dalam perkembangannya di masa kolonial, dibangun infrastruktur kota, seperti fasilitas pemerintahan, fasilitas umum, dibangunnya pelabuhan Belawan sebagai penopang ekonomi kota, dan dibangun pula sarana transportasi kereta api untuk mempercepat mobilitas ekonomi. Dengan perkembangan Medan yang begitu pesat, maka Medan dijadikan sebagai Ibukota Keresidenan Sumatera Timur. Lalu pada periode selanjutnya, Medan dijadikan sebagai sebuah *Gemeente* (kotapraja).

Perkembangan Medan menjadi sebuah kota menampilkan gambaran unik. Ia berkembang bukan hasil perencanaan pemerintah kolonial, seperti kota-kota lainnya di Hindia, tetapi terbentuk karena kepentingan para kapitalis perkebunan untuk menjadikan daerah ini sebagai poros ekonomi perkebunan di pantai timur Sumatera.

## Tumbuhnya Kapitalisme Perkebunan di Kampung Medan Putri

Ekspansi Belanda di wilayah Medan tidak bisa dilepaskan dari sejarah eksploitasi perkebunan-perkebunan di Sumatera Timur. Belanda masuk ke wilayah Sumatera Timur melalui Kerajaan Siak. Kolonial Belanda berhasil mengadakan perjanjian politik dengan Kerajaan Siak yang disebut dengan Traktat Siak. Perjanjian tersebut ditandatangani pada 1 Februari 1858 oleh Sultan Ismail dan Tengku Putra dan perwakilan dari pemerintah kolonial Belanda yaitu Residen Riau, F. N. Nieuwenhuijzen. Dengan adanya surat perjanjian tersebut, pemerintah kolonial Belanda mulai melancarkan strategi perluasan wilayah kekuasaannya, terutama ke daerah Sumatera Timur yang merupakan daerah *vasal* (taklukan) Kerajaan Siak, seperti Kota Pinang, Batu Bara, Badagai, Panai, Bilah, Asahan, Serdang, Langkat, Temiang, serta daerah Kerajaan Deli (Schadee, 1918: 71-73).

Pada 1862, empat tahun setelah penandatanganan Traktat Siak, Residen E. Netscher berlayar ke berbagai kerajaan di Sumatera Timur. Adapun tujuan Netscher, ialah memastikan sikap

tunduk raja-raja yang berada dibawah kekuasaan Siak, dan mengakui kedaulatan pemerintah Hindia Belanda atas kerajaan mereka masing-masing sesuai isi Traktat Siak. Gayung bersambut, Sultan Mahmud Perkasa Alam, menyatakan bersedia mengakui kedaulatan pemerintah kolonial Belanda, tetapi dengan syarat Siak harus melepaskan Deli dari wilayah *vasal*-nya. Netscher menyetujui syarat dari Deli. Maka pada 22 Agustus 1862, Sultan Mahmud Perkasa Alam menandatangani perjanjian dengan pemerintah kolonial Belanda yang diwakili oleh E. Netscher sebagai *Residen Riau en Onderhoorigheden* (Residen Riau dan daerah taklukannya). Perjanjian ini kemudian dikenal dengan nama *Acte van Verband* yang disahkan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda (Nurhamidah, 2004: 15). Adapun isi dari perjanjian *Acte van Verband* adalah “bahwa Sultan Deli taat dan setia pada Raja Belanda/Gubernur Jenderal Hindia Belanda dan melaksanakan pemerintahan di Deli sesuai adat dan peraturan; bersedia memajukan negeri dan rakyat; dan bersedia mematuhi syarat-syarat penambahan akte yang belum jelas atau belum tercantum.

Setahun setelah penandatanganan perjanjian *Acte van Verband*, tepatnya pada 5 Maret 1863, Netscher kembali melakukan perjanjian tambahan dengan Sultan Mahmud Perkasa Alam. Ketentuan yang termuat dalam perjanjian tambahan tersebut antara lain bahwa tanah-tanah di Deli tidak akan diperjualbelikan kepada orang-orang Eropa dan orang-orang asing lainnya (Nurhamidah, 2004: 15). Dengan demikian, tanah Deli hanya boleh diperjualbelikan dengan pemerintah kolonial Belanda saja. Adanya perjanjian ini, membuat posisi pemerintah kolonial semakin kuat karena orang-orang asing lainnya tidak dibenarkan mendapatkan tanah di wilayah ini. Untuk memperkuat kedudukannya di Deli, pemerintah kolonial Belanda kemudian membangun kantor perwakilannya di wilayah tersebut. Oleh sebab itu, ditempatkanlah kontrolir J. A. M. de Cats Baron de Raet di Labuhan (Ibukota Kerajaan Deli), sebagai perwakilan pemerintah kolonial Belanda di Deli (Nurhamidah, 2005: 19).

Dengan ditandatanganinya *Acte van Verband* oleh Sultan Mahmud Perkasa Alam, sejak saat itu pula pemerintah kolonial Belanda mulai melakukan kontrak politik dan memulai eksploitasinya di wilayah Deli. Dengan Akta Perjanjian itu pula Belanda semakin mudah mengontrol dan mendikte sultan sesuai kemauan politiknya. Setelah penandatanganan *Acte van Verband* seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Labuhan mulai dilirik untuk dijadikan wilayah perkebunan tembakau. Pada 1863, seorang pengusaha perkebunan berkebangsaan Belanda di Surabaya, Jacobus Nienhuys, sampai di Deli atas ajakan seorang keturunan Arab yang mengaku pangeran Deli, Said Abdullah Ibn Umar Bilsagih. Dalam ajakannya, Abdullah menyatakan bahwa wilayah Deli sangat cocok untuk perkebunan tembakau. Atas bantuan Abdullah, Nienhuys kemudian berhasil mendapatkan konsesi tanah dari Sultan Mahmud Perkasa Alam untuk penanaman tembakau di wilayah Deli (Pelzer, 1985: 55). Daerah konsesi yang pertama untuk penanaman tembakau terletak di tepi sungai Deli yaitu seluas 4.000 *bau* (*bouw*). Konsesi ini diberikan selama 20 tahun. Selama 5 tahun pertama Nienhuys dibebaskan dari pembayaran pajak dan sesudah itu baru membayar f 200 setahun (Wie, 1977: 3).

Dalam perkembangannya, usaha perkebunan tembakau Nienhuys di Labuhan Deli terbilang berhasil. Lahan yang digunakan oleh Nienhuys di wilayah tersebut mampu menghasilkan daun tembakau berkualitas tinggi sebagai pembungkus cerutu yang halus. Sehingga harga yang ditetapkan untuk tembakau dari Deli cukup tinggi di pasar dunia. Keberhasilan ini lantas dimanfaatkan Nienhuys untuk memperluas lahan perkebunan tembakaunya dengan menyusuri sungai Deli ke hulu hingga dia sampai ke sebuah kampung di pertemuan sungai Deli dan sungai Babura. Kampung tersebut ialah Kampung Medan Putri (Anderson, 1971: 273). Kemudian Nienhuys merasa tertarik untuk menetap di kampung tersebut. Maka pada 1869, Nienhuys memindahkan kantor perusahaannya, *Deli Maatschappij*, dari Labuhan ke Medan, karena letak

Medan yang lebih tinggi dari Labuhan dapat terhindar dari banjir. Alasan lain karena Medan sendiri pada waktu itu masih penuh dengan hutan sehingga cukup mudah untuk melakukan perluasan lahan perkebunan tembakau.

Pindahnya kantor *Deli Maatschappij* ke Medan, mendatangkan keuntungan bagi Nienhuys dan bagi kampung Medan pada saat itu. Dengan keberhasilan Nienhuys, Medan mulai dilirik pengusaha-pengusaha Eropa, seperti Inggris, Perancis, Amerika Serikat, dan Swiss. Banyak diantara pengusaha Eropa tersebut yang tertarik untuk menanamkan investasinya di wilayah Medan. Pemerintah kolonial Belanda sebagai pemegang tampuk kekuasaan tertinggi, tentu saja mendorong dan membuka pintu lebar-lebar bagi masuknya investasi dan modal swasta asing tersebut. Masuknya modal asing untuk membuka perkebunan di wilayah Medan telah membawa perubahan tersendiri bagi kampung Medan Putri. Perubahan ini terlihat dari banyaknya kantor-kantor perusahaan perkebunan besar yang mulai dibangun di kampung Medan ketika itu, di antaranya kantor *Deli Maatschappij*, kantor *Deli Batavia Mij.*, *Tabak "Arendsburg" Mij.*, dan berbagai fasilitas umum lainnya (Passier, 1955: 3).

Keberadaan pengusaha Eropa dan pekerja timur asing, Cina dan India, untuk perkebunan-perkebunan di wilayah Medan Putri telah membuat suasana kampung tersebut ramai oleh penduduk asing (Bool, 1903: 1-2). Melihat situasi ini, Sultan Deli meminta pemerintah kolonial Belanda untuk melakukan penambahan pada perjanjian *Acte van Verband* pada 10 November 1872. Adapun isi perjanjian tambahan yang dimintanya sultan ialah berkenaan dengan pemisahan status rakyat Kerajaan Deli dengan rakyat pemerintah kolonial Belanda (Nurhamidah, 2004: 16). Kemudian pada 14 November 1875, Sultan Deli dibawah pemerintahan Sultan Makmun Al-Rasyid Perkasa Alam, kembali meminta ada penambahan beberapa pasal pada *Acte van Verband*. Perwakilan pemerintah kolonial Belanda ketika itu adalah Residen Sumatera Timur, Stoffel Locker de Bruijne. Adapun beberapa penambahan pasal yang diminta sultan, berkenaan dengan cara pemungutan hasil-hasil perkebunan dan cara keluar masuk komoditi perkebunan tersebut di wilayah Deli. Selain itu pasal tambahan lainnya mengatur tentang status rakyat, pemungutan cukai terhadap komoditi yang keluar dan masuk untuk wilayah Padang/Bedagai (Tebing Tinggi-Deli) dan pengaturan kekuasaan di Belawan (Nurhamidah, 2004: 16).

Laju perkembangan industri perkebunan di wilayah Medan Putri pada periode selanjutnya ternyata sangat pesat. Oleh sebab itu, para pengusaha-pengusaha yang ada di daerah tersebut kemudian mulai membangun fasilitas-fasilitas penunjang pergerakan usaha mereka, seperti membuka kantor-kantor dan memperbaiki jalan-jalan. Kampung Medan Putri pun kemudian diperluas dengan menggabungkannya dengan kampung-kampung lain disekitarnya, seperti kampung Pulo Brayan, dan kampung Kesawan (Anderson, 1971: 273). Dengan menyatunya kampung-kampung kecil tersebut maka nama wilayah ini kemudian lebih dikenal dengan Medan.

Perkembangan Medan yang begitu pesat, juga membuat pemerintah kolonial Belanda memindahkan kedudukan Asisten Residen Deli dari Labuhan ke Medan pada tahun 1879 (Ratna, 2006: 12). Asisten Residen Deli sendiri pada masa itu berada dibawah Keresidenan Sumatera Timur dengan ibukotanya Bengkalis. Pindahnya Asisten Residen Deli ke Medan semakin menguatkan posisi Medan, sehingga Medan tidak disebut kampung lagi melainkan sebagai kota baru.

Pertumbuhan Medan sebagai kota baru masa itu ternyata belum menarik hati Sultan Deli untuk ikut pindah ke Medan. Sultan Deli, Makmun Al-Rasyid Perkasa Alam, ketika itu malah berupaya agar Labuhan sebagai ibukota Kerajaan Deli tetap ramai. Untuk itu, sultan membangun Istana Kampung Bahari di Labuhan pada 1886 (Sinar, 1991: 100). Namun keinginan sultan tidak merubah keadaan. Medan bahkan lebih maju dari sebelumnya. Melihat itu, pemerintah kolonial

Belanda memindahkan ibukota Keresiden Sumatera Timur yang awalnya di Bengkalis ke Medan pada 1 Maret 1887. Dijadikannya Medan sebagai ibukota Keresidenan Sumatera Timur, membuat Sultan Deli mulai melirik Medan. Maka pada 26 Agustus 1888, Sultan Deli, Makmun Al-Rasyid, mulai mendirikan Istana Maimun di Medan. Namun, secara resmi Sultan Makmun Al-Rasyid dan keluarga kerajaan pindah ke Medan dan menempati Istana Maimun pada 18 Mei 1891 (Sinar, 1991: 100). Dengan demikian, Medan menjadi ibukota Kesultanan Deli pada tahun itu juga. Pindahannya sultan ke Medan, membuat pamor Labuhan semakin jatuh dan pada akhirnya mengalami kemunduran dengan sendirinya. Labuhan tidak lagi menjadi bandar penting bagi pemerintah kolonial Belanda, disebabkan endapan-endapan lumpur yang semakin memperdagkal aliran sungai, yang mengakibatkan aktivitas pelayaran terganggu. Sebagai gantinya, Belawan dibangun pemerintah kolonial Belanda sebagai pelabuhan baru (Ratna, 2006: 12).

### **Medan dan Pertumbuhan Perusahaan-perusahaan Kapitalis**

Medan sebagai ibukota Keresidenan Sumatera Timur dan juga ibukota dari Kesultanan Deli, telah tumbuh sebagai sebuah kota baru yang sangat berpengaruh di Sumatera. Penduduk kota ini pun sangat plural, akibat dari perkembangan industri perkebunan, sehingga banyak menarik pengusaha dan pekerja asing untuk mengadu peruntungan di kota ini. Selain itu, urbanisasi penduduk bumiputra dari berbagai etnis juga tidak terbendung, seperti etnis Minangkabau, Mandailing, Karo, Toba, Pak-pak, Aceh, Banjar, dan lain sebagainya. Kedatangan mereka ke Medan untuk mencari pekerjaan dan berdagang. Banyaknya etnis pendatang tersebut semakin melengkapi etnis-etnis pendatang lainnya yang lebih dahulu menetap di Medan, seperti Cina, India, Jawa yang bekerja sebagai kuli di perkebunan, Arab yang biasanya berdagang, serta para pengusaha perkebunan dari berbagai bangsa, seperti Inggris, Swiss, Jerman, Jepang, dan sebagainya.

Para pengusaha asing yang ada di Medan, tidak semua sebagai pengusaha perkebunan. Diantara mereka juga banyak yang mengembangkan bisnis dibidang lain, seperti mendirikan perusahaan kereta api, perusahaan air bersih, perusahaan listrik, rumah sakit, perhotelan, dan toko serba ada. Dengan keberadaan bisnis-bisnis pengusaha ini tentu dengan sendirinya telah melengkapi infrastruktur kota Medan.

#### **a. Perusahaan Kereta Api Deli (*Deli Spoorweg Maatschappij – DSM*)**

Keberadaan kereta api di kota Medan dan sepanjang perkebunan-perkebunan Pantai Timur Sumatera tidak terlepas dari adanya pengaruh pemerintah kolonial Belanda. Perkembangan perkebunan tembakau di wilayah Medan dan sekitarnya yang sangat pesat sejak abad XIX, tentu memerlukan transportasi yang lebih cepat untuk mengangkut hasil perkebunan tersebut. Selama ini hasil perkebunan tembakau diangkut lewat jalan darat yang berlumpur jika hujan datang dengan menggunakan gerobak-gerobak yang ditarik oleh hewan-hewan seperti sapi, kerbau, dan kuda beban sebagai alat pengangkutnya, atau lewat sungai dengan sampan-sampan kecil menuju Labuhan. Situasi ini dianggap kurang menguntungkan bagi pengusaha-pengusaha perkebunan tembakau karena lambatnya proses pengiriman hasil perkebunan (Indera dan Suprayitno, 1998: 17-8).

Oleh karena itu pada 1881 muncul inisiatif dari Cremer (Menejer Deli Maatschappij) untuk pembuatan jalan kereta api dari Medan menuju Labuhan. Pada 23 Januari 1883, ide Cremer ini direalisasikan pemerintah kolonial Belanda dengan memberikan konsesi kepada *Deli Maatschappij* untuk membangun jalan kereta api (Loderichs, 1997: 14-15). Namun dalam bulan Juni 1883

konsesi tersebut dialihkan kepada *Deli Spoorweg Maatschappij* atas prakarsa beberapa pengusaha Belanda, seperti P. W. Janssen (Direktur Deli Maatschappij.), B. Heldring (Direktur Nederlandsche Handel Maatschappij), dan I. J. van Santen (Direktur Nederlandsche Indische Handelsbank), dengan mengumpulkan modal investasi sebesar f 2.440.000,-. Para pengusaha Belanda tersebut juga sepakat mendaftarkan *Deli Spoorweg Maatschappij* ke Notaris J. E. Clausing (Indera dan Suprayitno, 1998: 25).

Pembangunan jalan kereta api ini dimulai pada bulan Oktober 1883, sedangkan jaringan lintasan pertama kereta api dibuka pada Juli 1886 dari Medan ke Labuhan. Pada Februari 1888 dibuka pula jalur Labuhan ke Belawan. Selanjutnya dibuka pula jalur lintasan Medan - Deli Tua dan Medan – Timbang Langkat (Binjai). Seluruh jaringan lintasan tersebut sepanjang 63 mil selesai pada 1889. Periode berikutnya diperoleh konsesi untuk membuka cabang-cabang jaringan lintasan ke Serdang – Perbaungan – Serdang – Hulu. Pada 1900 dibuka pula jaringan lintasan kereta api ke Pangkalan Brandan dan Pangkalan Susu karena di daerah tersebut terdapat tambang-tambang minyak (Weisfelt, 1972: 44-59). Keseluruhan telah dibuka 162 mil jaringan lintasan dengan 54 stasiun. Pembangunan jalur lintasan kereta api cukup signifikan sejalan dengan dengan ekspansi perkebunan ke beberapa kawasan di Pantai Timur Sumatera baik di wilayah utara maupun selatan dengan menjadikan kota Medan sebagai titik pusatnya, sehingga hasil dari perkebunan-perkebunan tersebut dapat dikirim lebih cepat ke Pelabuhan Belawan sebagai pintu masuk dan keluar barang impor dan ekspor (Buiskool, dalam: Colombijn, dkk. (ed.), 2005: 282-3; Wie, 1977: 246-7). Pelabuhan Belawan dibangun pemerintah kolonial Belanda untuk melayani kegiatan perdagangan dan pelayaran bertaraf internasional, menggantikan Labuhan Deli yang mengalami pendangkalan yang diakibatkan endapan-endapan lumpur yang dibawa aliran sungai Deli.

Dalam perkembangannya jalur lintasan rel kereta api ini semakin panjang, karena saling menyambung antara perkebunan-perkebunan yang berada di kawasan Pantai Timur Sumatera baik ke wilayah utara maupun selatan. Adapun daftar panjang lintasan rel kereta api tersebut bisa dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 1. Lintasan dan Panjang Rel Kereta Api Deli Pada Tahun 1883-1940**

Lintasa Rel	Panjang (Km.)	SK	Peresmian
Medan – Labuhan	16.743	No. 17, tgl 23 Jan 1883	25 Juli 1886
Medan – Binjai	20.888	No. 17, tgl 23 Jan 1883	01 Mei 1887
Medan – Deli Tua	11.249	No. 17, tgl 23 Jan 1883	04 Sep 1887
Labuhan – Belawan	6.162	No. 17, tgl 23 Jan 1883	16 Feb 1888
Medan – Serdang	20.122	No. 09, tgl 28 Apr 1988	01 Juli 1889
Serdang – Perbaungan	17.668	No. 09, tgl 28 Apr 1988	07 Feb 1890
Binjai – Selesai	10.576	No. 01, tgl 20 Jun 1889	19 Des 1890
Bamban – Perbaungan	30.350	No. 02, tgl 12 Feb 1900	11 Apr 1902
Stabat – Binjai	24.036	No. 01, tgl 13 Juli 1900	01 Ags 1904

Tanjung Pura – Brandan	19.505	No. 01, tgl 13 Juli 1900	15 Des 1904
Stabat – Rantau Laban	22.428	No. 01, tgl 13 Juli 1900	20 Juni 1903
Pakam – Bangun Purba	27.936	No. 25, tgl 13 Jul 1901	10 Apr 1904
Bamban – Rantau Laban	10.680	No. 24, tgl 20 Sep 1901	02 Mar 1903
Kp. Baru – Arnhemia	14.872	No. 62, tgl 26 Jun 1906	01 Okt 1907
Rt. Laban – Tjg. Balai	95.602	No. 14, tgl 19 Sep 1912	06 Ags 1915
Tjg. Balai – Tlk. Nibung	4.592	No. 14, tgl 19 Sep 1912	01 Feb 1918
Tebing – Siantar	48.464	No. 02, tgl 25 Ags 1914	05 Mei 1916
Deli Tua – P. Batu	3.035	No. 28, tgl 10 Jun 1915	01 Des 1915
Brandan – Besitang	14.990	No. 56, tgl 26 Okt 1917	29 Des 1919
Besitang – P. Susu	9.510	No. 56, tgl 26 Okt 1917	01 Des 1921
Kisaran – Membang Muda	57.111	No. 06, tgl 13 Des 1926	19 Ags 1937
Membang Muda – Milano	44.199	No. 07, tgl 24 Okt 1928	19 Ags 1937
Milano – Rt. Prapat	12.562	No. 07, tgl 24 Okt 1928	19 Ags 1937
Total Panjang Rel	553.223		

Sumber: J. Weisfelt, *De Deli Spoorweg Maatschappij Als Factor In De Economiche Ontwikkeling van De Ooskust van Sumatra*, Rotterdam: Bronder-Offset N.V, 1972, (dirangkum dari halaman 44-62 dan 170).

Dengan adanya jalur lintasan kereta api di perkebunan-perkebunan Sumatera Timur, *Deli Spoorweg Maatschappij* melihat peluang diversifikasi usaha yang bisa dikembangkan, diantaranya jaringan telepon, fasilitas perumahan, dan sewa gudang. Sarana komunikasi seperti telepon, sangat mungkin dilakukan dengan mempergunakan fasilitas yang telah tersedia yaitu jalur lintasan kereta api, sehingga menghemat pengeluaran untuk pemasangan tiang-tiang telepon. Sarana komunikasi telepon ini berperan dalam melancarkan arus informasi ekonomi sehingga distribusi komoditi perkebunan yang diangkut akan lebih mudah dan lancar. Selain itu dapat membantu pemerintah dalam memperlancar komunikasi antar *afdeeling* maupun *landschap* di wilayah Sumatera Timur (Indera dan Suprayitno, 1998: 26-9, dan 33).

#### **b. Perusahaan “Ayer Bersih”**

Dalam mempersiapkan Medan sebagai ibukota Keresidenan Sumatera Timur pada 1887, maka pemerintah kota bersama *Gemeente Fonds* pada 1886 telah mulai mempersiapkan cara untuk membenahi kota, agar pantas menyandang kedudukan tersebut. Sarana dan prasarana kota pun diperbaiki seperti penggantian saluran-saluran lama dengan drainase yang baik, pengaspalan jalan-jalan kota, penerangan jalan dipasang, namun tempat persediaan air minum yang baik belum ada di kota Medan.

Keadaan tersebut dimanfaatkan oleh P. Kolf dan J. Van Vollenhoven (komisaris-komisaris *Deli Maatschappij*) yang berhasil membujuk direksi mereka serta mendapatkan konsesi pembangunan perusahaan air bersih di kota Medan, dengan syarat perusahaan tersebut harus menyediakan air untuk tiga tempat pemandian umum, air minum ledeng untuk orang banyak, pompa kebakaran bebas biaya, dan 10 buah air mancur. Proyek pembangunan ini ditangani oleh Mr. Boyshuyer dari 1903 dan selesai pada 1905. Air tersebut disalurkan dari mata air Sumbul ke tangki penampungan raksasa di Medan yang tingginya 185 kaki. Menjelang akhir tahun 1907 terdapat 283 rumah yang telah disuplai airnya dari perusahaan tersebut. Direktur dari perusahaan tersebut ialah Honert, Augus Jansen, dan P. Kolff sebagai direktur pelaksana dan Mr. J. Van Vollenhoven (perwakilan Deli Mij.), W.H.M. Scahdee (perwakilan DSM) dan Ir. Polis sebagai Menejer Pelaksana (Indera dan Suprayitno, 1998: 58-9).

### **c. Rumah Sakit Deli Maatschappij**

Sarana dan prasarana pendukung perkembangan kota Medan selanjutnya ialah adanya Rumah Sakit *Deli Maatschappij*, yang dibangun oleh Nienhuys pada 1871. Dokter pertama yang bertugas di rumah sakit ini adalah dr. H. Sanders Ezn. Rumah Sakit *Deli Maatschappij* pada awalnya hanya memberi pelayanan kesehatan kepada para kuli perkebunan yang datang ke Sumatera Timur dengan penyakit ringan saja, sedangkan pasien yang sakit berat akan dibawa ke Penang (Verster, 1919: 34-5).

Pada Juli 1899 dibuka ruang operasi atas prakarsa H. Ingerman, dari hasil derma sebesar f 15.000,- oleh P. W. Janssen. Namun biaya pembangunan ruang operasi tersebut tidak cukup. Kemudian H. Ingerman memungut sumbangan dari pemilik perkebunan Namoe Terasi, Firtz Meyer dari Zurich, sebesar f 10.000,- ditambah sebidang tanah sebagai tempat untuk pembangunan rumah sakit tersebut. Kemudian H. Ingerman juga mengajak orang-orang Belanda dan masyarakat setempat yang tinggal di kota Medan untuk membantu mengembangkan rumah sakit tersebut (Sinar, 1991: 59-60).

Dengan sarana dan prasarana yang telah ada di kota Medan, menjadikan kota ini ramai ditinggali pengusaha-pengusaha perkebunan, pekerja asing, dan penduduk setempat yang berdatangan dari berbagai daerah seperti Mandailing, Aceh, Minang Kabau, dan lain sebagainya. Pemerintah kolonial Belanda pun mulai membangun kantor-kantor pemerintahannya di kota Medan. Oleh karena itu pada periode selanjutnya kota Medan dijadikan sebagai Ibukota Keresidenan Sumatera Timur.

### **d. Perusahaan Listrik (OGEM)**

Perusahaan listrik pertama kali ada di kota Medan pada 1819. Perusahaan ini memperoleh konsesi dari Deighreis & Co. Namun kontrak pertama dengan pemerintah kota baru diperoleh Maret 1900, untuk menerangi jalan-jalan di kota Medan. Pada awalnya pimpinan perusahaan ini dipegang oleh perusahaan Mesrs Koopman & Co. yang kemudian diambil alih oleh Kerstens dan Harlingen, sedangkan komisarisnya W.H.M. Schadee. Pada masa mereka inilah mesin-mesin baru dipasang dan konsumen-konsumen swasta ditambah hingga mencapai 16% dan taripnya dikurangi. Adapun yang menjadi konsumen perusahaan listrik ini diantaranya Medan Hotel dengan 523 lampu, Hotel De Boer dengan 352 lampu, perumahan Tjong A Fie dengan 425 lampu, masyarakat kulit putih dengan 334 lampu, dan Istana Maimun dengan 317 lampu (Sinar, 1991: 59).

### **e. Perhotelan**



Perkembangan kota Medan dengan segala keindahannya pada masa itu menyebabkan kota ini banyak dikunjungi para pendatang. Para pendatang ini biasanya seperti tuan-tuan kebun yang datang ke kota Medan untuk mengurus bisnis perkebunan mereka, dan setelah itu mereka ini akan menghabiskan waktu sementara di kota untuk melepas penat dengan menikmati suasana kota yang indah dan modern. Tidak hanya tuan-tuan kebun, para pendatang juga berdatangan dari luar kota Medan untuk menikmati suasana kota tersebut. Dengan semakin ramainya pengunjung yang berdatangan ke kota Medan, tentunya membutuhkan tempat tinggal sementara, maka hal ini dimanfaatkan beberapa pengusaha Belanda untuk membangun hotel-hotel, seperti Medan Hotel dan Hotel De Boer.

Medan Hotel atau dikenal juga sebagai *House of Food* (Rumah Makan) pada awalnya didirikan oleh Vink pada 1888. Hotel ini merupakan penyuplai bir-bir dingin ke perkebunan-perkebunan yang ada di sekeliling kota Medan. Untuk pengurus manajemen hotel ialah Mr. Raer dan dibantu oleh Hans Klocke. Makanan yang disajikan di hotel ini sangat terkenal karena memiliki Chef M. Rohr, seorang Swiss. Hotel ini bertingkat dua dan memiliki 62 buah kamar. Hotel ini ramai sekitar tanggal gajian di perkebunan yaitu tanggal 1 dan 16 setiap bulannya, karena para tuan kebun akan berkunjung ke Medan bersama keluarganya. Hotel ini juga sering dijadikan tempat perjamuan perpisahan antara seorang tuan kebun yang telah sukses dan akan kembali ke Eropa dengan kawan-kawannya (Sinar, 1991: 59-60).

Selain itu terdapat juga Hotel De Boer yang didirikan oleh Herman De Boer pada 1909 dengan dana f 200.000,-. Hotel ini memiliki 40 buah kamar dan diterangi 400 buah lampu. Hotel De Boer ini berada di sebelah barat laut *Esplanade* (Lapangan Merdeka sekarang) dan berdekatan dengan *Witte Societeit* dan Kantor Pos (Sinar, 1991: 60-1).

#### **f. Medan's Warenhuis (Toko Serba Ada)**

Medan's Warenhuis adalah sebuah nama toko serba ada yang terletak dipusat kota Medan. Toko ini dibangun oleh sebuah perusahaan dagang bernama N.V. Medan's Warenhuis. Pada saat pembangunan gedung toko tersebut N.V. Medan's Warenhuis berada di bawah pimpinan I. Cornfield. Medan's Warenhuis dirancang oleh Gerard Bos pada 1918. Sebelum membangun toko, rancangan bangunan tersebut terlebih dahulu dinilai oleh Komisi Keindahan Kota (*Schoonheidcommissie*), dan mendapat persetujuan pada bulan Juli 1918 (*De Sumatra Post*, 26 Juli 1918). Gedung Medan's Warenhuis terdiri dari dua lantai dengan luas keseluruhannya 8000 m<sup>2</sup>, lantai dasar seluas 1400 m<sup>2</sup>, dan lantai dua seluas 1000 m<sup>2</sup> (*De Sumatra Post*, 5 Oktober 1917; 6 Juli 1918). Pembangunan toko ini menghabiskan biaya sebanyak f 200.000,- (*De Sumatra Post*, 5 Oktober 1917). Pada masanya, Medan's Warenhuis merupakan tempat para elite berbelanja. Hanya orang-orang yang memiliki kedudukan dan beruang banyak yang memasuki toko ini. Penggambaran toko ini sama dengan Mall saat ini.

### **Kota Medan Sebagai Ibukota Keresidenan Sumatera Timur**

Perkembangan kota Medan mempunyai ciri khas tersendiri, yaitu bergantung kepada kapitalisme perkebunan. Kota Medan menjadi pusat dari aktivitas kapitalisme perkebunan itu sendiri. Hampir semua bangunan perkantoran dibangun di kota Medan untuk menopang industri perkebunan tersebut. Dalam menunjang perekonomian kota Medan terjadi struktur piramida antara tiga kelompok. Kelompok tersebut adalah *planter* (tuan kebun), *entrepreneur* (pengusaha Cina dengan tokoh utamanya Tjong A Fie) dan Sultan Deli sebagai penguasa wilayah Deli (Hartono, dalam: Colombijn, dkk. (ed.), 2005: 431-33).

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, kota Medan dijadikan sebagai ibukota Keresidenan Sumatera Timur pada 1 Maret 1887. Hal ini menandakan kota Medan sebagai pusat kegiatan perekonomian dan pemerintahan di Sumatera Timur. Dalam pembagian wilayah di Sumatera Timur menjadi beberapa *afdeelingen* (wilayah setingkat dengan kabupaten sekarang). Wilayah kota Medan dijadikan sebagai *hoofdplaats* (ibukota) *Afdeeling Deli en Serdang* (*Staatsblad van Nederlands-Indie*, 205/1879; 64/1900).

Dalam tahun 1887, setelah kota Medan menjadi ibukota Keresidenan Sumatera Timur sekaligus merangkap sebagai *hoofdplaats Afdeeling Deli en Serdang*, Residen Sumatera Timur mengeluarkan keputusan yang mengatur penyerahan tanah untuk perumahan. Pada tahun 1889 dikeluarkan model akte untuk penyerahan tanah tersebut yang disebut dengan *grant*. Dalam perkembangannya terdapat beberapa jenis *grant* yakni yang dikeluarkan oleh pemerintah kolonial Belanda, Sultan Deli, dan *Deli Maatschappij* (Jansen, 1925: 9). Ketetapan dan peraturan mengenai agraria ini yang kemudian menjadi dasar dari wilayah *Gemeente* (kotapraja) Medan dan ketetapan hukum masyarakat yang berada di wilayah *Gemeente* tersebut.

Dengan adanya peraturan tersebut di atas, maka terjadi pemisahan wilayah kekuasaan Kerajaan Deli dengan wilayah kekuasaan pemerintah kolonial Belanda, sehingga dibuat peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan tentang batas-batas kekuasaan dan hak Sultan Deli atas segala isi yang terdapat dalam hukumnya. Di samping itu, diatur juga ketentuan-ketentuan tentang batas dan hak pemerintah kolonial Belanda dalam mencampuri urusan Kerajaan Deli. Dalam peraturan tersebut wilayah Kerajaan Deli disebut dengan *Landchap Sultangrant* dan wilayah pemerintah kolonial Belanda disebut dengan *Gemeente* (AS-GB TZG AG, No. 8448: 23, dan 32-3).

Untuk memudahkan urusan mengenai pembangunan dan pengaturan wilayah di kota Medan, pada 1886 pemerintah kolonial Belanda telah membentuk sebuah komisi yang bernama *Negorijraad* atau *Commissie tot het beheer v/h Gemeente fonds* yang lebih dikenal dengan nama *Gemeente Fonds*, yaitu suatu badan yang bertugas mengatur dan memperhatikan kepentingan kota Medan setempat bersama-sama dengan alat-alat yang ada padanya (ENI, no.7, 1917: 1126). Tapi sungguh pun komisi ini sudah terbentuk dengan suatu tugas yang khusus untuk memperhatikan dan mengatur keadaan kota Medan, tetapi kekuasaan *Binnenlands Bestuur* (Asistent Resident, *Controleur*, dan sebagainya) dalam soal-soal pemerintahan di kota Medan ini masih berjalan seperti biasa, sehingga terjadi tumpang tindih kepentingan dan kekuasaan.

*Gemeente fonds* mengumpulkan dana awal sebanyak f 32.000,- yang diperuntukkan memelihara kebersihan sanitasi, keperluan air minum, perawatan pompa kebakaran dan lain-lain. Pengumpulan dana dari komisi ini dihasilkan di antaranya dari tunjangan Kesultanan Deli, kontribusi secara sukarela dari penduduk, penghasilan dari sewa dan bangunan dan sebagian hasil tanah dalam lingkungan wilayah Medan (Sinar, 1991: 56). Dengan demikian dapatlah dikatakan, bahwa *Gemeente Fonds* dalam masa 20 tahun telah menjadi pelopor yang baik bagi urusan rumah tangga kota Medan yang mempunyai kewenangan khusus sebelum terbentuknya *Gemeente* Medan.

Pada tahun 1906 dibentuk pula sebuah lembaga lain yang diberi nama *Afdeelingsraad van Deli*, sejenis lembaga dewan kota. Namun, meskipun sudah ada pembentukan tersebut, tetapi *Gemeente Fonds* masih saja meneruskan tugasnya sebagaimana biasa hingga masa likuidasi *Afdeelingsraad* ini pada tanggal 1 April 1909 (Nurhamidah, 2004: 20). Jadi *Afdeelingsraad van Deli* hanya berlaku selama kurang lebih 2 tahun saja dan telah mempunyai 23 anggota yang terdiri dari orang Eropa, orang Bumiputra, dan orang Timur Asing. Susunan anggota-anggota *Afdeelingsraad van Deli* dari tahun 1906 sampai dengan tahun 1908 tercatat sebagai berikut: E.G.

Th. Maier (Ketua); J. Roest; Mr. J. Rahder; S. Blok; J. D. L. Le Febvre; J. van Vollenhoven; W. H. M. Schadee; E. J. van Lier; O. Magnee; Ds. J. Brink; J. N. Eikema; Dr. J. G. C. Vriens; H. J. G. Wolff; Dr. F. W. van Haften; Mr. H. J. Bool; G. L. J. D. Kok; J. J. C. Knokke v.d. Meulem; R. J. Koppenol; Tengku Besar van Deli (Tk. Amaluddin); Datuk Hamparan Perak; Kpt. Tjong A Fie; Kpt. India Mohd. Ali. Yang menjadi Sekeretaris *Afdeelingsraad van Deli* ketika itu adalah Jhr. R.J.M. de Roy van Zuijdewijn (Nurhamidah, 2004: 20).

### **Lahirnya Gemeente Medan**

Kota Medan lahir pada 1 April 1909 sebagai sebuah *gemeente* (kotapraja). Pembentukan *Gemeente Medan* didasari *Desentralisatiewet 1903*. *Desentralisatiewet 1903* merupakan undang-undang ketatanegaraan Belanda yang mengatur mengenai pembentukan daerah-daerah desentralisasi di Hindia Belanda. Berdasarkan pasal-pasal undang-undang tersebut, beberapa daerah ataupun bagian dari daerah, dapat didesentralisasikan, yaitu diberikan keuangan sendiri yang terpisah untuk digunakan dalam mengurus kepentingan khusus daerahnya (*Staatsblad van Nerderlands-Indie*, 329/1903).

Sebelum Medan dijadikan *gemeente*, lembaga yang mengatur urusan alat keperluan kota ialah *Afdeelingsraad van Deli*. Namun setelah dibentuknya *Gemeente Medan* pada 1 April 1909, maka lembaga tersebut dibubarkan dan dibentuk lembaga sejenis dewan kota yang bernama *Gemeenteraad* yang mengatur cara pemerintahan di dalam kota dan *Cultuurraad* yang mengatur urusan di luar kota. Anggota dari *Gemeenteraad* terdiri dari 15 anggota, yakni 12 orang Eropa, 2 orang Bumiputra dan 1 orang Timur Asing (*Verslag van de Verrichtingen van den Gemeenteraad van Medan over het Jaar 1918*: 3).

*Gemeenteraad* (dewan kota) bertungas mengatur seluruh kebijakan dan urusan dalam kota, karena pada saat itu belum ada walikota. Ketua *Gemeenteraad* ini ialah E.G. Th. Maier, yang sebelumnya menjabat sebagai ketua *Afdeelingraad van Deli* dan sedang menjabat sebagai Asisten Residen Deli dan Serdang (Nurhamidah, 2004: 20-1), sehingga dapat disimpulkan pada waktu tersebut sering terjadi tumpang tindih kewenangan dalam mengatur *Gemeente Medan*.

Pada 1 Januari 1918 terjadi perubahan besar pada lembaga *Gemeenteraad*. Perubahan besar ini ialah diadakannya pemilihan anggota *Gemeenteraad* dengan diberikannya hak pilih bagi golongan bumiputra dan kepala pemerintahan *Gemeente Medan* tidak lagi dari anggota *Gemeenteraad Deli en Serdang* seperti sebelum-sebelumnya, melainkan akan diadakan pemilihan walikota Asing (*Verslag van de Verrichtingen... 1918*: 3).

Pemilihan Umum 1918/1919 dilakukan untuk memilih anggota *Gemeenteraad* dan walikota. Pemilihan Umum ini dilakukan secara bertahap. Daftar pemilih pada tahun tersebut 492 nama, diantaranya 464 orang Eropa, 27 orang Bumiputra, dan 1 orang Timur Asing. Ada dua jenis pemilihan pada tahun tersebut yakni pemilihan umum berkala dan pemilihan sementara. Hasil pemungutan suara pada pemilihan umum berkala sebanyak 324 pemilih dan 163 pemilih pada pemungutan suara ulang, sedangkan hasil pemungutan suara pada pemilihan umum sementara sebanyak 309 pemilih dan 310 pemilih pada pemungutan suara ulang (*Verslag van de Verrichtingen... 1918*: 5).

Hasil dari pemilihan anggota *Gemeenteraad* ini menetapkan 17 anggota dewan, dengan rincian 10 orang Eropa, 5 orang Bumiputra, dan 2 orang Timur Asing (*Staatsblad van Nerderlands-Indie*, 587/1917). Selain itu juga ditetapkan Walikota *Gemeente Medan* untuk pertama kalinya sesuai dengan *Besluit Gubernur* pada 13 April 1918 No. 12. Dalam menjalankan tugas sehari-hari walikota merangkap sebagai ketua *Gemeenteraad* (*Raad van Burgermeester en Wethouders*)

(*Verslag van de Verrichtingen... 1918: 3*). Berikut ini adalah Walikota *Gemeente Medan* dan anggota *Gemeenteraad* yang terpilih pada tahun 1918:

Walikota : D. Baron Mackay  
 Wakil Walikota : Mr. C. Suthoff  
 Anggota *Gemeenteraad* : Tengkoë Amaloedin; G. H. Andreae; A. J. E. Dingemans; J. H. Gaade; Ismail; Kajamoedin gelar Radja Goenoeng; G. Lodder; Mohamad Noech; Mohamad Sjaaf; Mr. C. Suthoff; Tan Boen An; S. D. Kapper; Tjong A Fie; Ir. J. van Tubergen; A. P. Verekamp; Dr. H. Vervoort; H. A. Wakker (*Verslag van de Verrichtingen... 1918: 3-4*).

Pada 12 November 1918 para anggota *Gemeenteraad* dibagi ke dalam sembilan komisi. Gambaran dari komisi dewan tersebut ialah:

1. Komisi Peraturan (membuat undang-undang, pendisiplinan dan tata tertib). Ketua dari komisi ini ialah Mr. C. Suthoff, dan beranggotakan Ismail, A.J.E. Dingemans, serta J.H. Gaade.
2. Komisi Teknis (yang menjalankan hasil kerja Komisi Peraturan). Ketua dari komite ini ialah G. Lodder, dan anggota-anggotanya ialah G. H. Andreae, Ir. J. Van Tubergen dan H. A. Wakker.
3. Komisi Keuangan, ketuanya ialah S. D. Kapper dan anggotanya terdiri dari Tjong A Fie, J. H. Gaade, dan A. P. Verekamp.
4. Komisi kesehatan, diketuai oleh Dr. H. Vervoort dan anggotanya ialah Amaloedin Tengkoë Besar dari Deli, Mohamad Sjaaf, Tjong A Fie dan A. P. Verekamp.
5. Komisi Penasihat untuk Rumah Potong Kota, diketuai oleh Dr. H. Vervoort dengan anggotanya S. D. Kapper dan G. Lodder.
6. Komisi Informasi dari Badan Penerangan dan Perizinan. Ketua dari komisi ini ialah J. H. Gaade dan beranggotakan S. D. Kapper, dan Tjong A Fie.
7. Komisi Bidang Pendidikan, diketuai oleh Mr. C. Suthoff. Anggotanya ialah Ismail, Kajamoedin gelar Radja Goenoeng, Tan Boen An, dan H. A. Wakker.
8. Komisi Perumahan Rakyat, diketuai oleh H. A. Wakker. Anggota-anggotanya terdiri dari Kajamoedin gelar Radja Goenoeng, Ir. J. Van Tubergen, A. P. Verekamp, dan Dr. H. Vervoort.
9. Komisi untuk Penentuan Daftar Pemilihan Umum 1919/1920. Komisi ini terdiri dari G.H. Andreae, A.J.E. Dingemans, Ismail, dan Tan Boen An (*Verslag van de Verrichtingen... 1918: 4-5*).

Pada 1918 pelayanan dinas kepegawaian *Gemeente Medan* yang melaksanakan tanggungjawab atau tugas sehari-harinya, dibagi ke dalam tiga bagian:

1. Bagian Administrasi Kota, berfungsi membuat keputusan kepada lembaga-lembaga kota seperti badan keimigrasian, kependudukan dan catatan sipil, dan lain sebagainya. Adapun susunan kepegawaiannya ialah E. W. F. B. L Hendricks (Sekretaris), L. J. Winckel (Wakil Sekretaris), B. J. G. Meurs (Kepala Juru Tulis), dan H. G. van Heije (Juru Tulis) (*Verslag van de Verrichtingen... 1918: 5*).

2. Bagian Pekerjaan Umum. Fungsinya membuat perencanaan dan pembangunan infrastruktur di dalam kota. Adapun susunan pegawainya ialah J. Hogervorst (Direktur), J. G. Eylander (Wakil Direktur), W. J. Froger dan P. A. J. de Vroom (Pengawas), W. Arnoldus (Pengawas Sementara), C. Zavorka (Pekerja Sementara), Mas Darusman dan Raden Soekardji (Kepala Juru Gambar), Achmad Chatib (Juru Gambar), Achmat (Juru Gambar Magang), Ph. de Korte (Kepala Juru Tulis), St. Simorangkir (Juru Tulis), dan Amat (Pelayan). Pada periode ini jumlah pekerja Dinas Pekerjaan Umum sebanyak 300 orang (*Verslag Omtrent den Dienst der Gemeentewerken van Medan over het Jaar 1918*: 1-2).
3. Bagian Rumah Potong Kota. Fungsinya melakukan pengawasan, pembinaan dan pengurusan terhadap Rumah Potong. Adapun staf pegawai yang bertanggungjawab pada departemen ini ialah P. Visser (Direktur merangkap Dokter Hewan Kota), Raden Abdul Manap (Asisten Dokter Hewan dari kalangan Bumiputra), G. H. Reichert (Pengawas dan juga Asisten Hakim), M. Boesthamie (Penulis), dan Muhamad Rais (Petugas Laboratorium dan Penjaga Susu) (*Verslag Omtrent den Veterinair-Hygienischen Dienst der Gemeente Medan over het Jaar 1918*: 18).

Pada 30 November 1918, Kerajaan Deli memberikan hibah tanah kepada pemerintah *Gemeente Medan*. Pemberian hibah tanah ini dimaksudkan untuk perluasan wilayah *Gemeente Medan*. Tanah yang dihibahkan tersebut yang berbatasan langsung dengan wilayah *Gemeente Medan*, kecuali tanah di Kota Maksim, Kampung Sungai Kerah Percut, tanah yang dikuasai Gubernemen dan tanah yang dipakai oleh Deli Spoorweg Maatschappij (AS-GB TZG AG, No. 8448: 4).

Selama tahun 1918 *Gemeenteraad* telah melakukan pertemuan sebanyak 16 kali dan menghasilkan 152 keputusan, sedangkan pada tahun 1919 diadakan 23 kali pertemuan dan keputusan yang diambil sebanyak 249 keputusan. Adapun beberapa keputusan penting yang diambil dewan kota selama tahun-tahun tersebut ialah: tentang pengendalian hama, penerangan kota, anggaran sewa, persediaan air minum, peraturan-peraturan, pendidikan, tempat orang Batak, dan masalah tanah hibah (*Verslag van de Verrichtingen... 1918*: 7-10).

Dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan *Gemeente Medan*, walikota bersama *Gemeenteraad* menyusun anggaran pendapatan dan belanja *Gemeente Medan*. Pada tahun 1919 disusun anggaran pendapatan yang diperoleh dari 25 saluran dana dan anggaran tersebut dibelanjakan untuk 16 bagian keperluan (Lampiran 1). Besarnya anggaran *Gemeente Medan* pada tahun 1919 adalah f 510.464,-. Anggaran tersebut diajukan oleh walikota *Gemeente Medan* D. Baron Mackay dan disahkan oleh Gubernur Sumatera Timur, Griizen (*Gemeente Medan*, 139/1919).

**Tabel 2. Daftar Anggaran Pendapatan dan Belanja  
Gemeente Medan Tahun 1919 Dalam Gulden ( f )**

Anggaran Pendapatan			
No.	Keterangan	Jumlah	Total
1	Pengelolaan Dana Sisa Pendapatan Masa Dinas 1918	36.000,00	510.464,-
2	Pendapatan dari Pemakaman Umum	2.500,00	
3	Pendapatan dari Pembersihan Kotoran / Tinja	5.500,00	

4	Pendapatan Kota dari Penyaluran Pekerja kepada Pihak ke Tiga	13.000,00	
5	Pendapatan dari Pengelolaan Sampah	360,00	
6	Pajak Pertunjukan Umum	28.000,00	
7	Pajak Anjing	2.500,00	
8	Pajak Minuman Keras	14.000,00	
9	Dana Pasar	2.700,00	
10	Pendapatan dari Pengoperasian Rumah Potong Kota	54.256,00	
11	Penerimaan Setoran dari Rumah Potong Untuk Membangun Rumah Dokter Hewan Kota.	1.168,00	
12	Menerima Pinjaman dari Rumah Potong Kota Pada Tahun 1919	4.845,00	
13	Sewa Bangunan Kota	6.000,00	
14	Kontribusi Perusahaan Kereta Api Deli dalam Pemeliharaan Jalan Rel	840,00	
15	Kompensasi Untuk Pengembangan Riset/Penelitian	17.000,00	
16	Pembayaran dari Pengelolaan Jasa	18.000,00	
17	Biaya Tambahan Pada Pajak Pribadi	20.000,00	
18	Jumlah yang Diisolasi dari Dana Umum	94.975,00	
19	Pemasukan dari Pungutan Pajak Daerah	55.600,00	
20	Dana Hibah untuk Kota	5.000,00	
21	Retribusi Tanah	65.000,00	
22	Bunga dari Dana yang Diinvestigasikan	3.020,00	
23	Penggantian Biaya Uang Muka yang Diberikan Pada Tahun Sebelumnya	1.200,00	
24	Anggaran yang Dikeluarkan Pemerintah dalam Menetapkan Pendapatan Sewa.	4.000,00	
25	Penggantian Biaya yang Dikeluarkan Pemerintah untuk Pengendalian Hama.	55.000,00	
<b>Anggaran Belanja</b>			
No.	Keterangan	Jumlah	Total
1	Administrasi Gemeente (Kotapraja)	60.133,00	510.464,-
2	Layanan Teknisi Umum	29.670,38	
3	Dinas Pekerjaan Umum	132.187,03	
4	Dinas Kebersihan	100.106,20	
5	Dinas Pengelola Kotoran / Tinja	12.556,40	
6	Dinas Pembangunan	5.530,00	
7	Pasar dan Pembangunan Pasar	2.451,25	
8	Rumah Potong	54.256,00	
9	Kesehatan Masyarakat	32.983,25	

10	Pemadam Kebakaran	6.360,00
11	Lampu Jalan	45.000,00
12	Pemakaman Umum	7.319,00
13	Biaya Pengumpulan Pendapatan Pajak	2.715,00
14	Dinas Pinjaman Kotapraja	4.845,00
15	Subsidi Ke Lembaga-Lembaga Kepentingan Publik	1.620,00
16	Pengajaran dan Pengembangan Masyarakat	3.720,00
17	Monumen Tamiang	20,00
18	Biaya Tidak Terduga	8.991,49

Sumber: Arsip Gemeente Medan, *Dienstjaar* 1919, No.139, ANRI.

Dari daftar anggaran pendapatan dan belanja Gemeente Medan pada tahun 1919 seperti terlihat pada tabel di atas, menunjukkan tatanan pemerintahan dibawah pimpinan walikota pertama Gemeente Medan, D. Baron Mackay, telah berjalan dengan sangat baik. Tentunya keberhasilan tersebut juga didukung oleh hasil kerja Gemeenteraad yang telah menyelesaikan berbagai persoalan-persoalan di dalam kota.

Pada 1920 terjadi perubahan pada keanggotaan Gemeenteraad. Ada beberapa nama yang sudah tidak ada lagi dan digantikan nama-nama baru. Untuk komposisinya masih sama dengan tahun 1918 yaitu 17 anggota, dengan 10 orang Eropa, 5 orang Bumiputra, dan 2 orang Timur Asing. Anggota dewan terpilih ini yaitu:

1. Abdullah Lubis : Pensiun tahun 1924
2. Tengku Besar Amaloedin : Pensiun tahun 1921
3. G. H. Andreae : Pensiun tahun 1921
4. Mr. P. B. Dijksterhuis : Pensiun tahun 1921
5. Ir. J. W. Duys : Pensiun tahun 1924
6. Ismail : Pensiun tahun 1924
7. Jap Soen Tjhay : Pensiun tahun 1924
8. D. A. van Kaathoven : Pensiun tahun 1924
9. S. D. Kaper : Pensiun tahun 1921
10. G. Lodder : Pensiun tahun 1921
11. Mohamad Noech : Pensiun tahun 1924
12. Radja Goenoeng : Pensiun tahun 1924
13. Mr. C. Suthoff : Pensiun tahun 1924
14. Tjong A Fie : Pensiun tahun 1921
15. A. P. Verekamp : Pensiun tahun 1924
16. J. de Waard : Pensiun tahun 1921
17. Vacature : Pensiun tahun 1921

(Sumber: AVROS, no.360/1920: 12).

Untuk melaksanakan tugasnya, para anggota Gemeenteraad ini dibagi ke dalam 12 komisi pada 18 November 1920. Adapun 12 komisi tersebut ialah:

1. Komisi Peraturan. Ketua dari komisi ini ialah Mr. P. B. Dijksterhuis, dan anggotanya ialah J. de Waard, Mr. C. Suthoff, dan G. H. andreae.
2. Komisi Teknis, diketuai oleh G. Lodder dan anggota-anggotanya ialah Ir. J. W. Duys, dan G. H. Andreae.
3. Komisi Keuangan. Ketua dari komisi ini ialah Walikota D. Baron Mackey, dan yang menjadi anggotanya ialah A. P. Verekamp, J. de Waard, Tjong A Fie, dan Mohamad Noech.
4. Komisi Kesehatan, diketuai oleh G. Lodder, anggotanya ialah A. P. Verekamp, Amaloedin, Tjong A Fie, dan Abdullah Loebis.
5. Komisi Hukum dan Perizinan. Anggotanya terdiri dari G. Lodder, Mr. P. B. Dijksterhuis, dan Tjong A Fie.
6. Komisi Bidang Pendidikan, diketuai oleh J. de Waard dan anggotanya terdiri dari W. D. Niestadt, F. J. H. Klevant, J. Keizer, Mohamad Kasim, dan Ismail.
7. Komisi Perumahan Rakyat, diketuai oleh A. P. Verekamp dan anggotannya terdiri dari J. de Waard, Mohamad Noech, dan Jap Soen Tjhay.
8. Komisi Pertanahan, diketuai oleh Mr. C. Suthoff dan anggotanya terdiri dari J. de Waard, G. H. Andreae, Mr. P. B. Dijksterhuis, dan Abdullah Loebis.
9. Komisi Penghasilan Pajak, diketuai oleh Mr. G. S. Brantsma dan anggotanya terdiri dari J. de Waard, Mr. P. B. Dijksterhuis, dan J. D. Wardenburg.
10. Komisi Pengawai. Anggota dari komisi ini terdiri dari G. Lodder, J. de Waard, dan Radja Goenoeng.
11. Komisi Air Limbah atau Saluran. Anggota dari komisi ini terdiri dari G. Lodder, Ir. J. W. Duys, dan J. Hongervorst.
12. Komisi untuk Penentuan Daftar Pemilihan Umum. Komisi ini diketuai oleh Walikota D. Baron Mackey, dengan anggotanya A. P. Verekamp, G. H. Andreae, Mr. P. B. Dijksterhuis, dan Jap Soen Tjhay. Selain itu terdapat juga anggota Tempat Pemungutan Suara (TPS) yaitu J. G. Koene dan U. J. Huber (AVROS, no.360/1920: 13-15).

Dalam melaksanakan tugas atau tanggungjawab sehari-harinya, pelayanan dinas kepegawaian *Gemeente Medan* tahun 1920 dibagi ke dalam empat bagian, yaitu: Bagian Administrasi Kota, Bagian Pendapatan Pajak, Bagian Pengelolaan Tanah, dan Bagian Pekerjaan Umum (AVROS, no.360/1920: 15).

Selama tahun 1920 *Gemeenteraad* telah melakukan pertemuan sebanyak 22 kali pertemuan, sedangkan jumlah keputusan bersama yang diambil dalam pertemuan tersebut sebanyak 312 keputusan. Adapun beberapa isu atau masalah penting yang dibahas dan diputuskan oleh pemerintah *Gemeente Medan* tahun 1920, terdiri dari: masalah saluran air atau drainase, persediaan makanan, penggajian staf, pajak, lalu lintas, regulasi staf, situasi perekonomian, perkeretaapian, polisi kota, perumahan rakyat, pendidikan eropa dan pendidikan bumiputra (AVROS, no.360/1920: 3-10).

Ditinjau dari segi pemerintahan, kota Medan telah mencapai prestasi yang gemilang. Pencapaian dari kinerja pemerintahan baik walikota, *Gemeenteraad* (dewan kota), dan lembaga-lembaga lainnya telah menghantarkan kota Medan menuju kota Modern bertaraf internasional. Hal ini juga di dukung adanya Lapangan Terbang Polonia yang telah dibuka tahun 1928. keindahan dan ke moderenan kota Medan telah membuat kota ini dijuluki sebagai *Parij van Soematra* atau Paris-nya Sumatera.



Keberhasilan walikota D. Baron Mackey bersama dewan kota dan lembaga pemerintahan lainnya, dilanjutkan pula oleh walikota-walikota Medan periode berikutnya, seperti Mr. J. M. Wessenlink (25 April 1931 - 19 Agustus 1934), Mr. G. Pitlo (19 Agustus 1934 - 27 Agustus 1938), dan Mr. C. E. E. Kuntze (27 Agustus 1938 - 13 Maret 1942) (Nurhamidah, 2004: 21). Namun pada 13 Maret 1942, keberhasilan pemerintah kolonial Belanda di Kota Medan berakhir total. Hal ini disebabkan masuknya pasukan militer Jepang ke kota Medan dan mengambil alih kekuasaan pemerintah kolonial Belanda di kota Medan. Sejak saat itu pemerintahan kota Medan dijalankan oleh pemerintahan militer Jepang.

## **Penutup**

Dari gambaran yang telah diuraikan di atas, dapat dilihat jelas proses transformasi moderitas kota Medan, yang awalnya bermula dari sebuah kampung kecil bernama Medan Putri hingga menjadi *Gemeente* Medan. Perkembangan kota Medan bermula dari perjanjian antara Sultan Mahmud Perkasa Alam dengan pihak Pemerintah Hindia Belanda pada tanggal 22 Agustus 1862, yang dikenal dengan "Acte van Verband". Perjanjian tersebut merupakan awal pengenalan eksploitasi perkebunan oleh penjajah di daerah Kesultanan Deli. Dengan perjanjian itu pula dinyatakan bahwa tanah-tanah tidak akan diserahkan kepada orang-orang Eropa dan orang-orang asing lainnya, sehingga hal itu mengakibatkan posisi pihak Hindia Belanda untuk menguasai tanah-tanah di daerah kekuasaan Kesultanan Deli semakin kuat. Dengan pembukaan perkebunan-perkebunan di daerah Sumatera Timur, Medan yang semula hanya merupakan tempat tinggal dan perkampungan yang sederhana akhirnya menjadi berkembang. Artinya Medan sebagai suatu bentuk komunitas yang sederhana lalu bertransformasi menjadi suatu tempat yang serba kompleks. Medan telah berubah menjadi pusat perekonomian yang berskala global.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Arsip dan Dokumen Resmi yang Dicitak

*Algemene Secretarie* seri *Grote Bundel Besluit* TZG AG, No. 8448.

AVROS, No. 360, *Verslag Betreffende de Gemeente Medan over het Jaar 1920*.

*Gemeente Medan, Dienstjaar 1919*. No.139.

*Staatsblad van Nederlands-Indie*, 1879, No. 205

*Staatsblad van Nederlands-Indie*, 1900, No. 64

*Staatsblad van Nederlands-Indie*, 1903, No. 329.

*Staatsblad van Nederlands-Indie*, 1917, No. 587.

*Verslag Omtrent den Dienst der Gemeentewerken van Medan over het Jaar 1918*. Medan: Varekamp & Co.

*Verslag Omtrent den Veterinair-Hygienischen Dienst der Gemeente Medan over het Jaar 1918*. Medan: Varekamp & Co.

*Verslag van de Verrichtingen van den Gemeenteraad van Medan over het Jaar 1918*. Medan: Varekamp & Co.

### B. Surat Kabar

De Sumatra Post, 6 Juli 1918.

De Sumatra Post, 26 Juli 1918.

De Sumatra Post, 5 Oktober 191

### C. Buku, Jurnal dan Laporan

Anderson, John (1971). *Mission to East Coast of Sumatra in 1823*. Kuala Lumpur: Oxford University Press.

Balbian Verster, J.F.L. de. (1919). *Deli-Maatschappij 1869-1919; Gedenkschrift bij Gelegenheid van het Vijftigjarig Bestaan*. Amsterdam: Roeloffzen-Hübner.

*Begraafplaatsrapport Gemeente Medan 1928*.

Bool, H. J. (1903). *De Chineesche Immigratie Naar Deli*, Utrecht: Ooskust van Sumatra Instituut.

- Buiskool, Dirk A. (2005). "Medan, A Plantation City on the East Coast of Sumatra 1870-1942", dalam Freek Colombijn, dkk. (ed.). *Kota Lama Kota Baru: Sejarah Kota-Kota di Indonesia Sebelum dan Setelah Kemerdekaan*. Yogyakarta: Ombak.
- Encyclopedie van Nederlandsch-Indie*, 1917. No. 7. s'Gravenhage-Leiden: Martinus Nijhoof - E. J. Brill.
- Hartono, Soehardi (2005). "Medan: The Challenges in the Heritage Conservation of A Metropolis", dalam: Freek Colombijn, dkk. (ed.), *Kota Lama Kota Baru: Sejarah Kota-Kota di Indonesia Sebelum dan Setelah Kemerdekaan*. Yogyakarta: Ombak.
- Indera, dan Suprayitno (1998). *Diversifikasi Usaha Deli Spoorweg Maatschappij dalam Pengembangan Prasarana Transportasi di Sumatera Timur, 1883-1940*. Medan: Fakultas Sastra – USU.
- Jansen, Gerard (1925). *Grantrechten in Deli*. Amsterdam: Oostkust van Sumatra-Instituut.
- Loderichs, M. A., D. A. Buiskool, B. B. Hering (et.al.) (1997). *Medan: Beeld van Een Stand*. Purmerend: Asia Maior.
- Nurhamidah (2004). "Perkembangan Kota Medan 1909-1951", dalam: *e-USU Repository*. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- \_\_\_\_\_ (2005). "Sejarah Buruh Perkebunan di Sumatera Timur", dalam: *Historisme 21/Tahun X/Agustus*, Medan: USU Press.
- Passier, Cor (1955). "Medan, Urban Development by Planters and Enterpreneurs (1870-1940)", dalam: J. M. Nas Peter (ed.). *Issues in Urban Development, Case Studies from Indonesia*. Leiden: Research School CNWS.
- Pelzer, Karl J. (1985). *Toeian Keboen dan Petani, Politik Kolonial dan Perjuangan Agraria*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Ratna (2006). "Labuhan Deli, Riwayatmu Dulu" dalam: *Historisme 22/XI/Agustus*. Medan: USU Press.
- Schadee, W. H. M. (1918). *Geschiedenis van Sumatra Oostkust, Deel I*. Amsterdam: Oostkust van Sumatra-Instituut.
- Sinar, Tengku Luckman (1991). *Sejarah Medan Tempo Doeloe*. Medan: Perwira.
- Weisfelt, J. (1972). *De Deli Spoorweg Maatschappij Als Factor In De Economicshe Ontwikkeling van De Oostkust van Sumatra*. Rotterdam: Bronder-Offset N.V.
- Wie, Thee Kian (1977). *Plantation Agriculture and Export Growth an Economic History of East Sumatra 1863-1942*. Jakarta: National of Institute of Economic and Social Research (LEKNAS - LIPI).